

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
- Anitius Amanat, *Membagi Warisan berdasarkan pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020)
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019)
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Ellyne Dwi Poesparini, Soelistyowati, Erni Agustin, Oemar Moechtar, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020)

- Eman Supraman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)
- Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris*, (Depok: FHUI, 1999)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999)
- Habib Adjie, *Implementasi Pendaftaran Tanah Waris oleh Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022)
- \_\_\_\_\_, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- \_\_\_\_\_, *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, (Bandung: Mandar Maju, 2017)
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2009)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan: Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018)
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Rajawali Pers: Jakarta, 1983)
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988)
- Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001)
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press: 2017)
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- NM. Wahyu Kuncoro, *Waris permasalahan dan solusinya, cara halal dan legal membagi warisan*, (Jakarta: Raih asa sukses, 2015)

- Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku pejabat umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and studies of Business Law, 2003)
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
- R. Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1975)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3. (Jakarta: UI Press, 2006)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet17, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007)
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan serba-serbi praktek notaris*, (Jakarta: Ichtiar baru, 2007)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1995)

### **JURNAL DAN KARYA ILMIAH:**

Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Al-Qadhâ*: Vol. 5 No. 1, 2018. DOI: 957-Article Text-2365-1-10-20190701

Agus Budianto, Shinta Pangesti, Debora Pasaribu, & Stephanie Faustina, "Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, April 2021, DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>

Ella Emilia Rahmasari, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, "Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan", *Journal Uniba Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022*

Giffari Yahya Muhamad, Suparjo, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris dengan Objek Warisan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berada diluar wilayah Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol, V. No. 2, 2021. DOI: 290-Article Text-440-1-10-20211224

I Gusti Bagus Yoga Prawira, "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah", *Jurnal IUS*, Vol IV No 1, April 2016

Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani, "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Keterangan Waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638*, Vol. 6 No. 1, Maret 2021

I Wayan Bagus Perana Sanjaya, I Gede Yusa, "Peranan Notaris Untuk Meniadakan Diskriminasi Dalam Membuat Keterangan Waris", *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.12 Tahun 2021. DOI : KW.2021.v10.i12.p07

Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9 No. 2

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Kepailitan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, “Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, Vol 5 No 1 Januari 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529>

Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, Lex Renaissance, Vol 2 No 1, Januari 2017

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019)



Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213)

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP Nomor 24 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

**PUTUSAN:**

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Putusan Nomor: 29 P/HUM/2022

**WEBSITE/INTERNET:**

CNBC Indonesia, “Dapat Rumah Warisan? Segini Nih Biaya Balik Namanya”  
<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221216144504-72-397573/dapat-rumah-warisan-segini-nih-biaya-balik-namanya>, diakses tanggal 7 April 2023

Guru Besar Unpad: “Indonesia Punya Ragam Sistem Hukum”.  
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/26/134621971/guru-besar-unpad-indonesia-punya-ragam-sistem-hukum-waris?page=all>, diakses pada 6 Desember 2022

Hukumonline, “Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-1t6236c9ba3d767?>, diakses pada 10 April 2023

Mia Iriandini, “Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam ketentuan pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris”.  
<https://media.neliti.com/media/publications/14163-ID>, diakses pada 2 Mei 2023

Notarynews, “6 Rekomendasi Penting: Diskusi Hukum Pengda Kota Bandung IPPAT Terkait Pasal 111 Permen ATR No 2021 tentang BN”. <https://notarynews.id/6-rekomendasi-penting-diskusi-hukum-pengda-kota-bandung-ippat-terkait-pasal-111-permen-atr-no-2021-tentang-bn/>, diakses pada 5 Desember 2022

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, <https://pusdik.mkri.id/index.php>, diakses tanggal 14 April 2023

Rumah.com, “Cara urus Surat Keterangan Waris (SKW) 2023 dan syaratnya”. <https://www.rumah.com/panduan-properti/surat-keterangan-waris-52420>, diakses pada 08 Maret 2023.

\_\_\_\_\_, “Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan, Ciri, dan Jenisnya di Indonesia”. <https://www.rumah.com/panduan-properti/akta-di-bawah-tangan-57234>, diakses pada 31 Maret 2023

